

"KEDAULATAN RAKYAT"

JUMAT KLIWON, 20 FEBRUARI 2015
(1 JUMADILAWAL 1948)

MESKI ADA TEKANAN AUSTRALIA RI Tak Perlu Takut Lakukan Hukuman Mati

YOGYA (KR) - Meski ada protes, ancaman bahkan 'tekanan' Abott agar Indonesia mengingat 'utang tsunami', Pemerintah Jokowi tidak perlu gentar melaksanakan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Indonesia harus tetap konsisten menjalankan hukuman mati yang telah dijatuhkan pada dua tersangka pengedar narkoba kelas kakap warga Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

"Pemerintah Indonesia tidak perlu risau dengan adanya ancaman dari Australia. Sebab dalam kasus ini Pemerintah Indonesia murni menghadapi kasus tindak kriminal," tandas pakar hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ali Muhammad PhD mengemukakan hal itu saat ditemui Rabu (18/2), di ruang kerjanya.

Disebutkan, Indonesia merupakan negara hukum dan berdaulat. Sehingga sudah sepantasnya Australia menghormati kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. "Masalah narkoba di Indonesia ini sudah sangat serius. Jutaan orang bisa meninggal karena narkoba. Kalau kita lihat dari survei United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), saat ini sudah ada 3 hingga 4 juta orang meninggal di Indonesia

karena narkoba. Karena itu kenapa sekarang di Indonesia dikatakan sebagai negara darurat narkoba," kata Ali Muhammad.

Ali mengatakan, kejahatan narkoba itu jauh lebih berbahaya dari kejahatan teroris. Sebab akibat yang dirasakan karena teroris akan terasa hanya dalam satu waktu saja, sementara akibat dari kejahatan narkoba bisa menghilangkan satu generasi. "Korban mati akibat narkoba bisa mencapai jutaan orang. Kita lihat saja bagaimana akibat narkoba ini menghancurkan satu generasi, dari mulai merusak otak, kepribadian, menghancurkan masa depan, hingga membunuh pengguna atau orang lain," paparnya.

Kasus hukuman mati terhadap pengedar atau gembong narkoba ini termasuk dalam tindak pidana kriminal. Karena ia bukan lagi menghilangkan satu nyawa manusia, bahkan bisa satu generasi. "Indonesia tidak perlu khawatir dengan ancaman Australia, seperti akan memboikot pariwisata Indonesia. Sebab hal ini menurut saya sangat berbeda. Warga Australia yang tidak terlibat pun saya yakin tidak akan mengalami hal sama seperti dua warga negara itu, karena ini murni masalah kriminal," lanjut Dosen Fisipol UMY tersebut. **(Fsy)-c**